

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pesatnya pertumbuhan organisasi profit maupun nonprofit (nirlaba). Terdapat adanya perbedaan diantara organisasi nirlaba dengan organisasi profit. Perbedaan yang mendasar tersebut terdapat pada cara dalam organisasi nirlaba mendapatkan sumberdaya yang dibutuhkannya agar dapat melakukan berbagai aktivitas dalam operasi organisasinya. Organisasi nirlaba memperoleh adanya sumber daya sumbangan dari para anggota atau penyumbang lainnya, yang tidak mengharapkan pengembalian atau imbalan dari organisasi tersebut. Sedangkan organisasi profit terdapat pemilik dan/atau investor yang mengharapkan adanya keuntungan (profit) dari hasil organisasinya.

Organisasi nirlaba secara umum tidak mengharapkan adanya imbalan/pengembalian, namun para penyumbang sebagai salah satu *stakeholders* utama pada organisasi nirlaba tentunya menginginkan adanya pelaporan, serta adanya pertanggungjawaban yang transparan, terhadap dana yang telah mereka berikan. Para penyumbang menginginkan dana yang telah mereka berikan dimanfaatkan dengan baik, para penyumbang ingin mengetahui kinerja keuangan selama satu periode, dan apakah dana yang diberikan dipergunakan untuk memberikan manfaat kepada publik.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dibidang keuangan yang meliputi transaksi keuangan mengenai sumber daya, pendapatan, dan beban, maka diperlukan sarana dalam bentuk laporan keuangan. Laporan

keuangan merupakan suatu informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan/pengguna laporan keuangan, seperti donatur, investor, kreditur, anggota organisasi, otoritas pengawasan, pemerintah, dan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional.(Sutarti, 2007)

Organisasi nirlaba perlu memberikan informasi keuangan kepada penyedia sumberdaya agar mampu menilai kinerja organisasi tersebut. Informasi keuangan yang dibutuhkan dapat berupa laporan keuangan didalam organisasi nirlaba tersebut. Dan organisasi nirlaba membutuhkan penyusunan laporan keuangan yang akuntabilitas agar memberikan informasi yang relevan, dapat dipahami, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.(IAI, 2016: 45.2)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar akuntansi keuangan yang digunakan atas laporan keuangan organisasi nirlaba. Standar tersebut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK nomor 45 revisi tahun 2011 meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan pada akhir periode laporan. Dengan menerapkan PSAK nomor 45 didalam laporan keuangan organisasi nirlaba, laporan keuangan menjadi lebih relevan dalam memenuhi kepentingan untuk para penyumbang, kreditur, anggota

organisasi, ataupun pihak lain yang memberikan sumberdaya bagi organisasi nirlaba.

Kenyataannya, masih banyak organisasi nirlaba yang belum menggunakan acuan/pedoman dalam pembuatan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang digunakan masih sangat sederhana, yang mana organisasi nirlaba tersebut belum membuat laporan keuangan yang seharusnya digunakan organisasi nirlaba seperti pada umumnya yakni yang menerapkan PSAK No. 45.

Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah tinggi, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institute riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. (Pontoh, 2013)

Poliklinik Kesehatan 05.09.02 Lumajang merupakan salah satu organisasi nirlaba karena mendapatkan dana dari BPJS Kesehatan dalam melakukan berbagai aktivitas dalam operasi organisasinya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi PSAK No. 45 pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Poliklinik Kesehatan 05.09.02 Lumajang)”.

1.2. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah yang diteliti yakni implementasi PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada laporan keuangan Poliklinik Kesehatan 05.09.02 Lumajang. Laporan keuangan yang diimplementasikan dalam PSAK No. 45 adalah laporan keuangan Poliklinik Kesehatan 05.09.02 Lumajang tahun 2018.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terdapat dalam penjelasan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi PSAK No. 45 pada Poliklinik Kesehatan 05.09.02 Lumajang?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam, penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi PSAK No. 45 pada Poliklinik Kesehatan 05.09.02 Lumajang.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi:

a. Bagi Poliklinik Kesehatan 05.09.02 Lumajang

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan masukan yang berguna, agar dapat meningkatkan mutu laporan keuangan Poliklinik Kesehatan berdasarkan PSAK No. 45.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini, diharapkan menambah wawasan, pengetahuan dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini, menambah pengetahuan dan wawasan dalam implementasi PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, khususnya poliklinik kesehatan.